



RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL

KABUPATEN LANGKAT

TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Langkat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Renja Dinas Sosial Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2024.

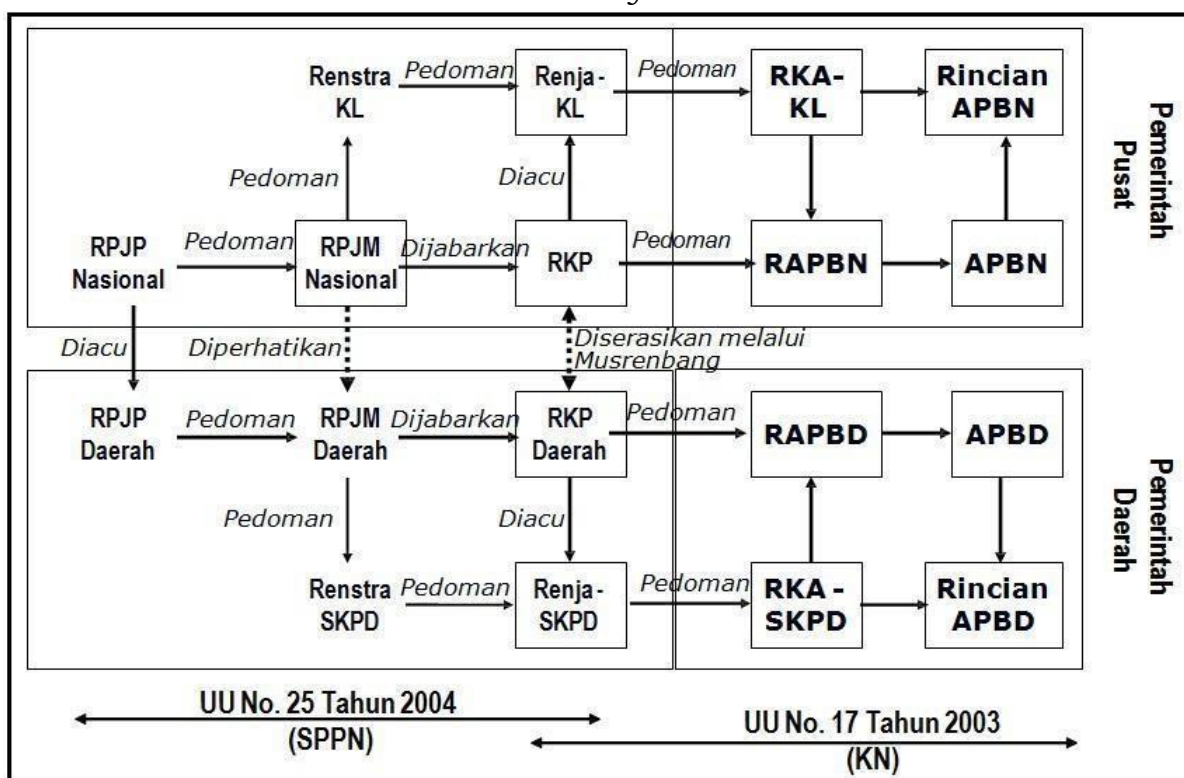
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Sosial Kabupaten Langkat Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Langkat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

- 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024;
- j. Peraturan Bupati Langkat nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024;
- k. Peraturan Bupati Langkat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Sosial Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Sosial dalam penyusunan RKA Dinas Sosial Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2022 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2024 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2022.

Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan Perangkat Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Sosial merupakan Perangkat Daerah dengan nama yang sama yaitu Dinas Sosial namun terdapat perubahan struktur organisasi.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Dinsos yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dinas Sosial Kabupaten Langkat

Kode Rek				Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	
1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%
					Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			
					Jumlah Kasus Pelanggaran Kedisiplinan Aparatur			
					Cakupan Peningkatan Kompetensi Pegawai			
					Presentase Dokumen Keuangan yg selesai tepat waktu			
					Presentase Laporan aset/barang daerah yang diterbitkan tepat waktu			
					Presentase Laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu			
1	06	01	2.01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	100%

1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja dan Renstra Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA dan DPA serta DPPA	3 dokumen	3 dokumen	100%
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKPJ, LAKIP, dan LPPD Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yg selesai tepat waktu	3 dokumen	3 dokumen	100%
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	14 bulan	14 bulan	100%
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	12 bulan	12 bulan	
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan	12 bulan	12 bulan	100%
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	100%
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi Pegawai	100%	100%	100%

1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terciptanya Keseragaman pegawai	36 Pasang	36 Pasang	100%
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terciptanya Aparatur yang berkualitas	6 Orang	6 Orang	100%
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Belanja Lampu Penerangan Kantor	60 buah	60 buah	100%
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan ATK	30 jenis	30 jenis	100%
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat-alat Pembersih dan bahan-bahan Pembersih	20 jenis	20 jenis	100%
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	100%
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Pengadaan Pengadaan Barang Caetakan dan Penggandaan	6 jenis	6 jenis	100%
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Belanja surat kabar Harian dan Mingguan	12 bulan	12 bulan	100%
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah maupun Keluar daerah	12 bulan	12 bulan	100%
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%

1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor	10 jenis	10 jenis	100%
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Operator Komputer, Jasa supir kantor, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan	12 bulan	12 bulan	100%
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengurusan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas, terlaksana Perawatan dan Belanja BBM Kendaraan Dins/ Operasional	12 bulan	12 bulan	100%
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terpenuhinya Fasilitasi Gedung Kantor	2 unit	2 unit	100%

1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%
1	06	02.2	03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas SDM PSM di Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Data Kemiskinan dan Kualitas SDM TKSK	12 bulan	12 bulan	100%
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Meningkatnya Kualitas SDM Karang Taruna	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Cakupan Layanan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	100%

1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terfasilitasinya pemulangan Warga negara Migran korban Tindak kekerasan	100%	100%	100%
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terfasilitasinya pemulangan Warga negara Migran korban Tindak kekerasan	100%	100%	100%
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas yang Berdayaguna	100%	92%	92%
					Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial				
					Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ATAU Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya				
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	100%	100%	83%

1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Permakanan	30 orang	30 orang	100%
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	tersedianya sandang	30 orang	0	0%
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	tersedianya alat bantu	20 alat bantu	20 alat bantu	100%
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	terlaksananya reunifikasi keluarga bagi orang terlantar	7 Orang	7 orang	100%
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Sprotual dan Sosial	24 Gelandangan dan Pengemis	24 Gelandangan dan Pengemis	100%
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	75 orang	75 orang	100%
1	06	04	2.01	07	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terfasilitasinya Pembuatan nomor induk kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5 orang	5 orang	100%
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	terpenuhinya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4 LKSA	4 LKSA	100%
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	terpenuhinya layanan data dan pengaduan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	1 keg	1 keg	100%
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terpenuhinya Pemberian Layanan Kedaruratan	2 Jenazah	0	0%

1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	terlaksananya pelayanan penelusuran keluarga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	10 Kasus	10 Kasus	100%
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya layanan rujukan ke Lembaga dan Kemitraan bagi Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandang Pengemis	10 LKS	10 LKS	100%
1	06	04.2	02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	100%	100%
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terpenuhinya layanan data dan pengaduan	1 Keg	1 Keg	100%
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terpenuhinya Pemberian Layanan Kedaruratan	35 Peserta	35 Peserta	100%
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Tersedianya sandang	100 Orang	100 Orang	100%
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya alat bantu	55 Orang	55 Orang	100%
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya perbekalan kesehatan di luar panti	10 kotak	10 kotak	100%
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	45 peserta	45 peserta	100%

1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	45 peserta	45 peserta	100%
1	06	04	2.02	09	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	terfasilitasinya Pembuatan nomor induk kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	10 Orang	10 Orang	100%
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	terpenuhinya layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5 Orang	5 Orang	100%
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	terlaksananya pelayanan penelusuran keluarga bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	10 Orang	10 Orang	100%
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya reunifikasi keluarga bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	1 kasus	1 kasus	100%
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Terpenuhinya Layanan Rujukan	10 LKS	10 LKS	100%
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kab/Kota	6 LKS	6 LKS	100%

1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan	100%	100%	100%
						Persentase Anak Terlantar yang dibina			
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak Terlantar	Terpeliharanya anak terlantar	4 LKSA	4 LKSA	4 LKSA
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Tertanganinya kasus anak terlantar	4 LKSA	4 LKSA	4 LKSA
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-anak Terlantar	Terlaksananya fasilitas dan perlindungan anak terlantar	4 LKSA	4 LKSA	4 LKSA
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya kegiatan perlindungan anak terlantar di LKSA	4 LKSA	4 LKSA	4 LKSA
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin di Kabupaten Langkat	23 Kec	23 Kec	23 Kec
1	06	05	2.02	01	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terdatanya Masyarakat yang menjadi Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	23 Kec	23 Kec	23 Kec
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin yang akurat dan terbentuknya Sumber Daya Manusia mengenai Pendataan Fakir Miskin	23 Kec	23 Kec	23 Kec
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan kemampuan kapasitas organisasi sosial yang membidangi Program Keluarga Harapan	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok

1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Kampung Siaga Bencana	100%	100%	100%
						Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat			
1	06	62	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Sosial Korban Bencana Alam	100%	100%	100%
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya kebutuhan dasar pangan untuk korban bencana dalam kondisi yang darurat rawan bencana	1 keg	1 keg	1 keg
1	06	62	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Ketertiban Penanganan Bencana yang terjadi di kabupaten	100%	100%	100%
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terciptanya Kampung Siaga Bencana terhadap Ancaman Bencana di Daerah	1 keg	1 keg	1 keg
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Caakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Kab.Langkat	3 TMP	3 TMP	3 TMP

1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Meningkatnya Fungsi Taman Makam	3 TMP	3 TMP	100%
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Kebersihan Taman Makam	3 TMP	3 TMP	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Tahun 2022, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	Penyediaan Sandang	Ada Kasus Tetapi tidak ditempatkan di dalam Shelter Karena Belum Adanya Shelter
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tidak Ada (Tidak Ada Kasus)

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya data kinerja Dinas Sosial yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya data capaian kinerja program dari masing-masing bidang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran yang menampung penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya anggaran yang mendukung kelancaran administrasi pelaksanaan tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya anggaran yang menampung pengadaan pakaian dinas dan atributnya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya anggaran untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya anggaran untuk komponen instalasi listrik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kecukupan anggaran untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya anggaran untuk penyediaan peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya anggaran untuk pengadaan bahan logistik kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya anggaran untuk barang cetakan dan penggandaan

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya anggaran untuk bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya anggaran untuk pengadaan peralatan dan mesin
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya anggaran untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya SDM pendukung dalam pelaksanaan pelayanan di Dinas Sosial
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya anggaran untuk jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya anggaran untuk service AC, komputer/laptop
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terfasilitasinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya informasi dan potensi PSM sebagai pekerja sosial masyarakat

	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menyelesaikan permasalahan sosial di masing -masing kecamatan
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersampainya informasi dan peningkatan kemampuan potensi bagi pekerja sosial dan bagi kesejahteraan sosial keluarga dan masyarakat
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terjalannya komunikasi, koordinasi dan konsultasi kepada lembaga-lembaga kemitraan
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	Penyediaan Permakanan	Ketersediaan data calon penerima manfaat bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis diluar panti sosial
	Penyediaan Alat Bantu	Tervalidasinya data calon penerima manfaat alat bantu
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terjalannya kembali antar sesama keluarga
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Teredukasinya bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi penerima manfaat

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Tersampainya informasi atau edukasi terhadap keluarga disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis
Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terselesaikannya kasus atas pemerlu layanan pendidikan dan kesehatan dasar
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terpenuhinya layanan data dan pengaduan atau PPKS
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terjalinnnya komunikasi, koordinasi dan konsultasi kepada pihak terkait
Pemberian Layanan Rujukan	Terjalinnnya komunikasi, koordinasi dan konsultasi kepada lembaga-lembaga kemitraan
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terpenuhinya layanan data dan pengaduan bagi PMKS
Pemberian Layanan Kedaruratan	Ketersediaan transportasi khusus pelayanan kedaruratan
Penyediaan Sandang	Ketersediaan data calon penerima manfaat bagi anak dengan kedisabilitas
Penyediaan Alat Bantu	Tervalidasinya data calon penerima manfaat alat bantu kursi roda
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Ketersediaan anggaran untuk perbekalan Kesehatan

	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Ketersediaan materi bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dan terjadwalnya bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Ketersediaan materi Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA dan terjadwalnya Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terjalannya komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan Disdukcatpil atas pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan KIA
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Adanya permohonan dan kasus atas pemerlu layanan pendidikan dan kesehatan dasar
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terjalannya komunikasi, koordinasi dan konsultasi kepada pihak terkait
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terjalannya kembali antar sesama keluarga
	Pemberian Layanan Rujukan	Terjalannya komunikasi, koordinasi dan konsultasi kepada pihak terkait
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terjalannya komunikasi, koordinasi dan konsultasi kepada lembaga-lembaga kemitraan
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	Pemeliharaan Anak Terlantar	
	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Tersedianya data anak terlantar dan terpenuhinya kebutuhan anak-anak terlantar

	Rujukan Anak-anak Terlantar	Adanya kasus yang dikoordinasikan dengan baik serta terjalannya koordinasi, komunikasi pihak terkait dalam penyelesaian masalah
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Tersedianya kebutuhan anak terlantar
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM pengelola DTKS di Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pemutakhiran data
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM pengelola DTKS
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya data penerima manfaat
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
	Penyediaan Makanan	Tersedianya data korban bencana
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terjalannya koordinasi, komunikasi dan konsultasi terkait kampung siaga bencana serta kebutuhan untuk bencana dan terinformasinya informasi kepada masyarakat tentang bencana
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Tersedianya anggaran rehabilitasi sarana prasarana TMP
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tersedianya petugas kebersihan dalam pelaksanaan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional di 3 Kecamatan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun KAK kegiatan agar pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dapat terarah sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan;
2. Penyusunan aliran kas dengan memperhatikan dan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disertai dengan pengendalian dan evaluasi serta penyediaan data informasi kebutuhan perencanaan;
4. Menyusun peta kebutuhan data berdasarkan bidang urusan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Sosial merupakan Perangkat Daerah yang bernama Dinas Sosial.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2022 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Dinas Sosial yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase jumlah PMKS	6,5 %	6,4 %	98,4 %
2.	Persentase peningkatan korban bencana penerima bantuan	40%	39,18 %	97,9 %
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	B	B	100%

Sesuai pencapaian IKU Dinas Sosial Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Sosial yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah.

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja yang berkualitas, selaras dengan tujuan yang akan dicapai dan terukur;
- b. Pengukuran kinerja yang berjenjang dan berkelanjutan;
- c. Laporan kinerja yang menggambarkan kualitas pencapaian kinerja serta upaya penyempurnaannya;
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui e-SAKIP yang menghasilkan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Langkat yang menjadi isu – isu penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah berikut :

Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di Dinas Sosial Kabupaten Langkat.	Terbatasnya dukungan dana Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelayanan serta Penanganan Sosial baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan Kabupaten.
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja yang relatif memadai untuk mendukung pelaksanaan program kerja.	Efektivitas Komunikasi dan Kordinasi antar pemangku kepentingan belum berjalan dengan baik.
Tersedianya media atau sarana penanganan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Dinas Sosial.	Masih rendahnya kompetensi SDM pelaksana Kesejahteraan Sosial.
Tersedianya sarana prasarana pendukung jaringan dan komunikasi Internet untuk mempercepat akses dalam verifikasi data.	Sistem pengelolaan data dan informasi belum terintegrasi

Selain itu, selama Tahun 2022, Dinas Sosial juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu :

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui SIKS-NG yang telah diinisiasi oleh kementerian social dalam menampung permasalahan social terkait kemiskinan.	Tingkat perekonomian yang masih rendah.
Tersedianya media atau sarana penanganan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Dinas Sosial.	Letak ibukota Langkat dekat dengan ibukota provinsi (Urbanisasi).
Masih terbukanya peluang untuk meningkatkan kompetensi SDM	Kondisi kemiskinan yang relatif dinamis sehingga perlu update secara periodik.
	Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kehidupan sosial.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- b. Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaran rehabilitasi sosial;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mengenai pemeliharaan anak-anak terlantar;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan data fakir miskin;
- e. Mengoptimalkan perlindungan korban bencana alam dan sosial.
- f. Mengoptimalkan penyelenggaran pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- g. Meningkatkan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.

- h. Mendorong SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Sosial Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Review terhadap Rancangan RKPD 2024
Dinas Sosial Kabupaten Langkat

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinsos	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5,069,404,736	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinsos	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5,069,404,736	
Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Cakupan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	8,750,000	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Cakupan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	8,750,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	2,050,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	2,050,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	4,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	4,500,000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	2,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	2,200,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinsos	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,454,497,616	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinsos	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,454,497,616	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2,353,107,616	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2,353,107,616	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinsos	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 laporan	96,840,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinsos	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 laporan	96,840,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2,750,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2,750,000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	1,800,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	1,800,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinsos	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	218,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinsos	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	218,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinsos	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 paket	18,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinsos	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 paket	18,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinsos	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	60,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinsos	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	60,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	60,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	60,000,000

Bimbingan Tekhnis Implemetasi Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	80,000,000	Bimbingan Tekhnis Implemetasi Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	80,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinsos	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	692,300,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinsos	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	692,300,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	15,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	15,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	28,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	28,500,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinsos	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	12,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinsos	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	12,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	65,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	65,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Dinsos	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	1 paket	12,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Dinsos	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	1 paket	12,000,000	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	19,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	19,800,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	540,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	540,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinsos	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	867,500,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinsos	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	867,500,000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	600,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	600,000,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	96,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	96,000,000	
Pengadaan Mebel	Dinsos	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 unit	21,500,000	Pengadaan Mebel	Dinsos	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 unit	21,500,000	

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	455,101,600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	455,101,600	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	122,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	122,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	333,101,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	333,101,600	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	373,255,520	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	373,255,520	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	322,255,520	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	322,255,520	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	21,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	21,000,000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Dinsos	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Dinsos	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinsos	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	57,50%	1,423,500,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinsos	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	57,50%	1,423,500,000	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Cakupan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	1,423,500,000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Cakupan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	1,423,500,000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	25,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	25,000,000	

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	276,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	276,000,000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	702,500,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	702,500,000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Dinsos	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	420,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Dinsos	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	420,000,000

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinsos	Persentase Penyandang Disabilitas yang Berdayaguna	40%	2,197,350,000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinsos	Persentase Penyandang Disabilitas yang Berdayaguna	40%	2,197,350,000	
		Persentase PMKS yang Memeperoleh Bantuan Sosial	70%				Persentase PMKS yang Memeperoleh Bantuan Sosial	70%		
		Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ATAU Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	60%				Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ATAU Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	60%		
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinsos	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	1,230,950,000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinsos	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	1,230,950,000	

Penyediaan Permakanan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standart Gizi Minimal Kewenangan Kab/Kota	250 Lansia 250 Penyandang Disabilitas 30 Gepeng	165,750,000	Penyediaan Permakanan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standart Gizi Minimal Kewenangan Kab/Kota	250 Lansia 250 Penyandang Disabilitas 30 Gelandangan dan Pengegris	165,750,000	
Penyediaan Sandang	Dinsos	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kab/Kota	250 Lansia 250 Penyandang Disabilitas 30 Gelandangan dan Pengegris	165,000,000	Penyediaan Sandang	Dinsos	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kab/Kota	250 Lansia 250 Penyandang Disabilitas 30 Gelandangan dan Pengegris	165,000,000	

Penyediaan Alat Bantu	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Kursi Roda 50 Kruk	82,500,000	Penyediaan Alat Bantu	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Kursi Roda 50 Kruk	82,500,000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,000,000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinsos	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	14,400,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinsos	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	14,400,000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dinsos	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Lansia 250 Penyandang Disabilitas 2 LKSA	478,100,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dinsos	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Lansia 250 Penyandang Disabilitas 2 LKSA	478,100,000	

Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	180,500,000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	180,500,000
Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	119,600,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	119,600,000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4,500,000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4,500,000
Pemberian Layanan Rujukan	Dinsos	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15,600,000	Pemberian Layanan Rujukan	Dinsos	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15,600,000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinsos	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	966,400,000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinsos	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	966,400,000

Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 PMKS 5 Dokumen	72,200,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 PMKS 5 Dokumen	72,200,000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinsos	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	320 Orang	304,600,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinsos	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	320 Orang	304,600,000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Dinsos	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	589,600,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Dinsos	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	589,600,000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinsos	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan	100%	1,456,540,710	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinsos	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan	100%	1,456,540,710	
		Persentase Anak Terlantar yang dibina	60%				Persentase Anak Terlantar yang dibina	60%		

Pemeliharaan Anak Terlantar	Dinsos	Cakupan Pemeliharaan Anak Terlantar	100%	215,000,000	Pemeliharaan Anak Terlantar	Dinsos	Cakupan Pemeliharaan Anak Terlantar	100%	215,000,000	
Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Dinsos	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100,000,000	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Dinsos	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100,000,000	
Rujukan Anak-anak Terlantar	Dinsos	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	50,000,000	Rujukan Anak-anak Terlantar	Dinsos	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	50,000,000	
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Dinsos	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	65,000,000	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Dinsos	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	65,000,000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	1,241,540,710	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	1,241,540,710	
Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100%	580,230,000	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100%	580,230,000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100%	100,490,210	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100%	100,490,210	

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinsos	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	138,170,500	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinsos	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	138,170,500
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinsos	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	422,650,000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinsos	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	422,650,000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinsos	Jumlah Kampung Siaga Bencana	4 Kampung	202,000,000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinsos	Jumlah Kampung Siaga Bencana	4 Kampung	202,000,000
		Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat	100%				Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat	100%	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinsos	Cakupan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	50,000,000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinsos	Cakupan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	50,000,000

Penyediaan Makanan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	20,000,000	Penyediaan Makanan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	20,000,000
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Dinsos	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	30,000,000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Dinsos	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	30,000,000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinsos	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100%	152,000,000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinsos	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100%	152,000,000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dinsos	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 kampung	20,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dinsos	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 kampung	20,000,000

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinsos	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	132,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinsos	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	132,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinsos	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	110,840,000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinsos	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	110,840,000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinsos	Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%	110,840,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinsos	Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%	110,840,000
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Dinsos	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 TMP	68,840,000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Dinsos	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 TMP	68,840,000

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 TMP	42,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 TMP	42,000,000
TOTAL				10,459,635,446					10,459,635,446

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Bappeda Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat pada tahapan musrenbang Kecamatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Namun demikian terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Sosial.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah **”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

- PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- PN 3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- PN 7 : Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan tranformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- b. Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaran rehabilitasi sosial;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mengenai pemeliharaan anak-anak terlantar;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan data fakir miskin;
- e. Mengoptimalkan perlindungan korban bencana alam dan sosial.
- f. Mengoptimalkan penyelenggaran pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019- 2024, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2024 adalah ” **Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja dalam Sektor Pariwisata dan Penyiapan Integrasi Sektor Ekonomi Unggulan (Pertanian, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM)**”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kemandirian Desa;
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
4. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Unggulan;
5. Pemulihan Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
6. Peningkatan Kualitas dan Kesempatan Kerja
7. Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam
8. Peningkatan Investasi dan PAD
9. Peningkatan Layanan Infrastruktur Wilayah dan Permukiman
10. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2024, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten
Langkat Tahun 2024

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pengentasan permasalahan sosial masyarakat		Persentase jumlah PMKS	6,7%
		Meningkatnya kesejahteraan sosial dan pengentasan permasalahan sosial masyarakat	Persentase jumlah PMKS	6,7%
		Meningkatnya penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana	Persentase peningkatan korban bencana penerima bantuan	65%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi AKIP	BB

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Langkat dan berpedoman pada Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024 serta mengacu pada Peraturan Bupati Langkat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Stabat, Agustus 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LANGKAT



TAUFIK RIEZA, S.STP, M.A.P
PEMBINA TK I
NIP. 19840511 200312 1 001

